

# APARATUS KEKUASAAN DALAM KEBIJAKAN PEDULILINDUNGI

Dionisius Komang Tri Alvino<sup>1)</sup>, Tedi Erviantono<sup>2)</sup>, Gede Indra Pramana<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dionalvino4@gmail.com<sup>1</sup>, erviantono2@unud.ac.id<sup>2</sup>, indraprama@unud.ac.id<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This study describes the workings of the power apparatus in implementing the PeduliLindungi policy on Kuta Beach. The apparatus of power in the process of implementing the PeduliLindungi Policy dominates the community through narratives of compliance with the policies that have been planned with the hope that the community will be easily regulated with the aim of breaking the chain of the spread of the virus. Kuta. This study uses a qualitative method to obtain data by conducting interviews and observations. This study uses the State Apparatus theory from Louis Althusser by categorizing two important elements, namely the Repressive State Apparatus and the Ideological State Apparatus. The PeduliLindungi policy runs because of the continuous efforts to domination so that traders inevitably submit because their interests are still based on economic ideology. The health narrative becomes more dominant than the economic narrative even though it includes resistances.*

**Keywords:** *PeduliLindungi Policy, Repressive State Apparatus, Ideological State Apparatus, Kuta Beach*

## 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini melihat dominasi aparatus kekuasaan bekerja dalam penerapan kebijakan PeduliLindungi di Pantai Kuta. Penerapan kebijakan aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk aplikasi *surveilans* kesehatan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 (Putri & Hamzah, 2021). Dominasi aparatus kekuasaan dalam proses pelaksanaan kebijakan PeduliLindungi berusaha mendominasi masyarakat melalui narasi untuk patuh dan mengikuti kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan penerapan aplikasi PeduliLindungi diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 terkait dengan penetapan aplikasi PeduliLindungi

dalam upaya pelaksanaan *surveilans* Kesehatan dalam upaya penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Putri & Hamzah, 2021).

Berbagai pendekatan yang dilakukan dalam memerangi Covid-19 terus dilakukan termasuk pendekatan berbasis teknologi, perkembangan teknologi informasi yang digunakan dalam ranah komunikasi di Indonesia diakomodasi oleh hukum siber. Segala upaya yang dilakukan termasuk pembatasan Covid-19 dengan merilis aplikasi *surveilans* masyarakat yang dikenal dengan PeduliLindungi (Frindo, 2020).

Aplikasi PeduliLindungi ditujukan utamanya dalam pemberian peringatan (*tracing, tracking, dan juga warning and fencing*) (Frindo, 2020). Upaya pemetaan yang dilakukan terhadap individu yang terindikasi terpapar oleh virus Covid-19. Akses untuk masuk dalam Destinasi Wisata

diwajibkan menggunakan PeduliLindungi sebagai syarat wajib dalam mengakses tempat wisata salah satunya Pantai Kuta.

Penerapan kebijakan ternyata ada berbagai kendala yang dialami oleh petugas maupun pengunjung yang hendak berkunjung mulai dari ketidaktersediaan paket internet, pengunjung yang belum mengunduh aplikasi PeduliLindungi, pengunjung yang tidak membawa atau tidak memiliki telepon pintar serta kelengkapan data yang membuat pengunjung tidak bisa langsung mengakses tempat wisata tersebut (Karnaedi, 2021).

Kebijakan penerapan PeduliLindungi ini menuai pro kontra dari masyarakat sekitar, akses masuk Pantai Kuta yang terdiri dari beberapa pintu sehingga menyulitkan dalam pengawasan yang dilakukan, kebijakan penutupan 17 pintu masuk yang ada dengan pagar beton mendapatkan protes dari pedagang yang berdagang pada pintu masuk tersebut karena mengakibatkan dagangan mereka menjadi sepi (Suryawan, 2021).

Penerapan kebijakan PeduliLindungi pada fasilitas umum dan tempat wisata menerapkan koordinasi dengan beberapa pihak dalam pengawasan dan kontrol pada proses pelaksanaan kebijakan. Penempatan aparat mulai dari polisi, TNI, pecalang, dan Linmas menjadi komponen yang mengontrol dan memastikan syarat pengunjung telah terpenuhi dan bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi pada saat memasuki daerah wisata (Frindo, 2020).

Pemanfaatan aparatus dalam pelaksanaan kebijakan PeduliLindungi tentunya memiliki alasan, salah satunya

untuk menjaga stabilitas masyarakat dan upaya mendapatkan ketundukan dari masyarakat itu sendiri (Mallard G. , 2005). Sebagai masyarakat kebijakan dengan narasi pemerintah dalam menunjukkan sisi positif kebijakan tersebut, dilain sisi masyarakat terdominasi dalam melaksanakan peraturan dan ideologi yang dikembangkan melalui narasi ditengah masyarakat (Mallard G. , 2005).

Menurut Althusser bahwa aparatus ideologi berkembang melalui pendidikan, keluarga, hukum, politik, budaya dan kelompok serikat pekerja sehingga nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat melalui kepatuhan mengenai kebijakan PeduliLindungi (Mallard G. , 2005).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian menggunakan *frame* teoritik *state apparatus* dalam perspektif Louis Althusser yang melihat dominasi Negara kepada masyarakat dalam sudut pandang aparat yang berbentuk represif dan ideologis (Cole, 1984). Bentuk dari aparatur yang represif tercermin dalam tindakan tegas aparat, aparatur yang ideologis tercermin dalam konsep doktrin yang disebarkan melalui agama, melalui konsep kekeluargaan maupun indoktrinasi hukum (Pertiwi, 2018). Dominasi kebijakan PeduliLindungi yang didalamnya melibatkan aparatur negara yang melaksanakan tugas dengan memaksa masyarakat yang berkunjung untuk mengikuti kebijakan *scan* PeduliLindungi sebagai syarat berkunjung.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih

dalam mengenai Dominasi Aparatus Kekuasaan dalam Penerapan Kebijakan PeduliLindungi. Studi kasus penerapan kebijakan PeduliLindungi di Pantai Kuta masa Pandemi Covid-19. Adapun pemilihan objek yang dipilih adalah Pantai Kuta karena objek wisata ini menjadi salah satu tempat percobaan dalam pembukaan destinasi wisata. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif maka penelitian ini melakukan pengambilan data melalui metode wawancara terhadap pengunjung, aparat, pemangku kebijakan, dalam penerapan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat akses masuk tempat wisata Pantai Kuta.

## 1. KAJIAN PUSTAKA

### Teori *State Apparatus*

*State Apparatus* adalah teori mengenai aparat yang represif dan ideologis dengan tokoh Louis Althusser sebagai pemikir yang mengidentifikasi dirinya sebagai Marxis-Leninisme dan berbagai tradisi Marxisme klasik. Teori ini saya dibantu untuk mengidentifikasi temuan dilapangan bagaimana dominasi tersebut dalam wujud *repressive state apparatus* dan *ideology state apparatus*. Dalam analisisnya terkait dengan masyarakat kapitalis, Althusser membedakan antara *Ideology State Apparatus* (ISA) yang bersumber dari interaksi dan *Repressive State Apparatus* (RSA). Konsep ISA berkembang dalam bentuk lembaga yang dibuat dan dirancang untuk memanipulasi publik dengan harapan melindungi kepentingan hegemoni.

Aparatur yang ideologi tercermin melalui doktrin agama, melalui sistem pendidikan, melalui keluarga, melalui hukum, ideologi melalui politik, serikat pekerja, melalui sistem komunikasi serta media, serta budaya dan olahraga yang dirancang sedemikian rupa untuk membangun *ideology state apparatus*. Berbeda dengan ideologi, *repressive state apparatus* mencakup tindakan yang dilakukan oleh aparat yang pada tujuannya dirancang untuk melakukan perlindungan kepentingan kelas penguasa dengan upaya yang dilakukan secara paksa menekan perbedaan yang dilakukan melalui pendapat populer.

Berdasarkan konsep Louis Althusser bahwa *ideology state apparatus* berjalan melalui ideologi, sedangkan *repressive state apparatus* berfungsi dengan kekerasan, intimidasi dan upaya penindasan fisik. Menurut Althusser bahwa Negara kapitalis perlu berfungsi dalam pengelolaan ideologi dalam memanipulasi publik, karena negara tidak dapat bertahan tanpa batas melalui kekerasan dan upaya penindasan yang terus berkelanjutan (Hyslop-Margison & Leonard, 2012). Berdasarkan pemikiran Althusser mengatakan bahwa Negara adalah 'mesin' represif yang pada dasarnya memungkinkan kelas penguasa dalam memastikan dominasi atas kelas pekerja.

Pembagian *ideology state apparatus* bekerja melalui ideologi yang disebarluaskan, bahwa ideologi ini disebarluaskan agar masyarakat dengan sukarela mematuhi apa pun yang diajarkan dalam ideologi Aparatur Negara. Peran yang dimiliki di antara *ideology* dan *repressive*

*state apparatus* memiliki satu tujuan untuk mengontrol masyarakat, upaya ideologi diharapkan mampu memberikan pengendalian secara internal (Pertiwi, 2018).

## 2. KONSEP DOMINASI

Dalam penelitian ini yang disebut sebagai dominasi mempengaruhi sifat kekuasaan yang memonopoli. Pada konteks penelitian ini dominasi mengarah pada bagaimana berjalannya *state apparatus* dan *ideological state apparatus*. Berlangsungnya kedua aspek tersebut dilakukan melalui sarana-sarana manusia maupun atribut yang digunakan yang sifatnya mendominasi satu sama lain, baik berupa tindakan, perilaku, maupun aksi dan reaksi dari tindakan yang dilakukan.

Dominasi pada dasarnya bersifat monopoli dan upaya dominasi yang dilakukan melalui *repressive state apparatus* dan *ideological state apparatus* mendorong masyarakat memberikan respon berupa resistensi terhadap upaya dominasi yang dilakukan.

Dominasi yang dilakukan melalui *ideological state apparatus* tercermin melalui upaya pemberitahuan dan arahan melalui pengeras suara atau upaya penyebaran poster, pamflet berupa ajakan atau himbauan terkait dengan upaya dominasi yang dilakukan. *Repressive state apparatus* menekankan pada tindakan dan penertiban yang dilakukan aparat terhadap pihak lain (Pertiwi, 2018).

Pembagian diantara *ideological state apparatus* dengan *repressive state apparatus* memiliki bagian masing-masing.

Dominasi yang dilakukan Negara Represif secara umum melakukan pengamanan paksa dengan fisik (Pertiwi, 2018). Polisi menjadi salah satu bagian aparat yang represif dengan tujuan menjaga stabilitas masyarakat, wewenang yang dimiliki polisi untuk memberikan hukuman bagi pelanggar hukum menjadi bagian represif negara terhadap masyarakatnya. Penertiban dan tindakan yang dilakukan oleh aparat sebagai bentuk represi Negara berusaha mendominasi dan memonopoli tindakan berdasarkan wewenang yang dimiliki.

*Ideological state apparatus* memiliki cara kerja yang berbeda dalam upaya dominasi. Ajakan dan himbauan yang dilakukan mengakibatkan masyarakat dengan sukarela mematuhi apapun yang diajarkan dalam ideologi dengan tujuan yang sama dengan represif yaitu melakukan kontrol masyarakat. Upaya kontrol kepatuhan yang dilakukan diharapkan meminimalisir upaya represif yang harus dilakukan Pemerintah terhadap masyarakatnya. Tiga aparat Ideologi Negara yaitu Agama, Keluarga, dan Hukum pada dasarnya memiliki peran untuk menghasilkan ketundukan warga Negara (Pertiwi, 2018).

### Konsep Kebijakan Peduli Lindungi

Aplikasi PeduliLindungi merupakan bagian sistem perangkat yang disusun dengan memanfaatkan teknologi dalam upaya pembangunan sarana pencegahan dan mitigasi covid dengan perangkat teknologi informasi komunikasi. Sistem aplikasi PeduliLindungi pada dasarnya sebagai solusi dalam menanggulangi

penyebaran virus Covid-19, maka Pemerintah Indonesia merilis aplikasi *surveilans* yang ditujukan dalam menangani penyebaran Covid-19 dengan bentuk melakukan penelusuran pelacakan, serta pemberian peringatan (Olivia, Rosadi, & Permata, 2020). Aplikasi yang bermanfaat guna membantu pemerintah dalam mengetahui pergerakan masyarakat melalui sistem pemetaan individu yang terpapar virus Covid-19.

Penetapan aplikasi PeduliLindungi melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang kebijakan penerapan pelaksanaan *surveilans* kesehatan penanganan virus corona (Covid-19). Sebagai aplikasi dikembangkan dengan berbagai fitur yang mempermudah masyarakat maka segala kemudahan dan kompleksitas aplikasi terus diperbaiki. Aplikasi PeduliLindungi diharapkan sebagai aplikasi yang mawadahi mitigasi bencana Covid-19 di Indonesia. Aplikasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi orang-orang yang pernah dinyatakan dalam kondisi positif Covid-19 atau pasien yang berada dalam status pengawasan (PDP) maupun orang yang berada dalam pengawasan (ODP).

Pengingat dalam memudahkan masyarakat dalam aktivitas diluar rumah, PeduliLindungi bagi masyarakat yang telah mengakses maka diwajibkan mengaktifkan *bluetooth* pada ponsel.

Data yang dihidupkan melalui *bluetooth* diharapkan dapat merekam lokasi dan waktu. Mekanisme ponsel-ponsel yang berdekatan kemudian saling berbagi dan melakukan perekaman ID anonim masing-

masing, data anonim ID tersebut kemudian dilakukan penyimpanan selama 14 hari, sehingga apabila ada seseorang yang dinyatakan sakit oleh petugas akan diinput dalam sistem data, maka sistem akan melakukan penyaringan pada ID-ID anonim yang sudah terekam pernah melakukan kontak dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir. Sehingga aplikasi PeduliLindungi memberikan hal penting sebagai fitur kesehatan mandiri melalui aplikasi pihak ketiga dalam mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat (Putri & Hamzah, 2021).

### **Konsep pengetahuan warga lokal**

Pengetahuan lokal biasa disebut sebagai *indigenous knowledge* merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu bentuk gejala yang dapat dilihat, dirasakan, dialami maupun yang dipikirkan berdasarkan pola dan cara berpikir suatu kelompok. Pada dasarnya sistem pengetahuan lokal berkenaan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang luas.

Pengetahuan lokal yang dimaksud berhubungan dengan flora, fauna, benda-benda, aktivitas, maupun peristiwa-peristiwa yang sudah dan pernah terjadi. Pengetahuan lokal berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, maupun budaya dimana masyarakat tersebut hidup dan melakukan aktivitas dalam upaya mempertahankan hidupnya (Rosyadi, 2014).

Sebagai makhluk hidup pada dasarnya manusia paling bisa beradaptasi dengan lingkungannya untuk upaya memanfaatkan

sumber-sumber yang ada dalam upaya menunjang kehidupannya. Hal tersebut mengakibatkan manusia dengan lingkungan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga manusia selalu menyadari akan segala perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, sekaligus berusaha mengatasi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk kepentingan yang dimiliki. Pengetahuan lokal menjadi istilah yang problematik. Pengetahuan lokal dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah sehingga titik temu antara pengetahuan lokal dan ilmiah adalah bagaimana mereka memahami dunianya sendiri.

Konsep sistem dalam pengetahuan lokal adalah terkait dengan kearifan lokal atau tradisional yang khas milik suatu masyarakat atau budaya yang berkembang lama menjadi hasil dari proses hubungan timbal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya. Pengetahuan lokal berakar dari sistem kearifan lokal dan pengelolaan lokal. Kondisi yang kemudian menyebabkan manusia selalu memiliki respon dan upaya adaptasi menghadapi krisis. Adaptasi dan perubahan menjadi dua hal yang beriringan. Dengan demikian menunjukkan bahwa adaptasi menjadi bagian strategi yang digunakan manusia dalam mengatasi perubahan lingkungan fisik maupun sosial (Rosyadi, 2014).

Sistem pengetahuan lokal masyarakat dapat digunakan dalam upaya analisis resiko lingkungan dan mitigasi bencana alam berdasarkan atas kajian ilmu pengetahuan dan pandangan etik. Perilaku yang terus berkembang menjadi sebuah

kebudayaan di suatu daerah secara turun-menurun sehingga dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah berasal atas pengetahuan lokal yang dimiliki. Adaptasi menjadi bagian dari evolusi kebudayaan yang harus dihadapi. Sebagai sebuah proses sosial adaptasi dapat berakhir dengan sesuatu yang diharapkan maupun tidak.

Penduduk setempat seharusnya diberikan ruang dalam analisis suatu situasi, mereka juga memiliki informasi empiris tentang suatu situasi (Fischer, 2020). Pengetahuan lokal tidak dapat dengan sendirinya melakukan pemaparan terhadap situasi, namun dengan pondasi sosial yang melekat dari kebijakan itu diakui maka interpretasi pengetahuan lokal dengan melibatkan partisipasi warga dapat membedah situasi dengan kebijakan yang tepat.

Kebijakan publik pada dasarnya harus membangun hubungan dengan wacana yang terhubung dalam upaya menyusun kebijakan, dalam konteks politik seharusnya wacana ilmiah berawal dari persoalan musyawarah publik. Pertanyaan penting yang harus mampu kita pahami dalam sebuah wacana adalah mempertanyakan bagaimana kemampuan warga negara dalam berpartisipasi, upaya dalam menghubungkan wacana warga dan pakar yang berbeda namun secara inheren saling tergabung.

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan metode primer dan sekunder. Menurut Agus Salim

(2006), pelaksanaan penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk melakukan upaya penafsiran terhadap fenomena sosial. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive yang digunakan peneliti dalam memilih informannya berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditetapkan peneliti sebagai informan.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Bapak I Wayan Sirna sebagai Ketua Satgas Covid-19 Pantai Kuta, Bapak Marshelo sebagai Balawista Pantai Kuta, Ibu Ni Luh Sritik sebagai pedagang gelang di Pantai Kuta, Ibu Ni Luh Tini sebagai penyedia jasa pijat dan pedagang di Pantai Kuta, Ibu Putu Suari sebagai penjual kain pantai di Pantai Kuta, dan Ibu Ketut Lastri sebagai penyedia jasa pijat di Pantai Kuta. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu Pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kebijakan PeduliLindungi sebagai bekerjanya Ideologi dan Aparatus Narasai Kesehatan.**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat sebagai bentuk upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui *ideological state apparatus* dengan pemasangan poster, *banner*, atau himbauan lainnya yang terkait dengan penanganan kondisi Pandemi yang melanda dengan mengedepankan pandangan tunggal terkait kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Upaya represif melalui *Repressive state apparatus* juga tercermin melalui penertiban yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini

aparat kepolisian dan satgas covid-19 Pantai Kuta terhadap pengunjung yang tidak memenuhi protokol dan pedagang diminta untuk tidak memasuki wilayah Pantai Kuta.

Aturan penerapan *barcode* PeduliLindungi juga dijaga dan diawasi oleh aparat yang berwenang. Pelaksanaan kebijakan PeduliLindungi menjadi tindak lanjut pemerintah selain upaya mematuhi protokol kesehatan serta upaya pemasangan tempat cuci tangan pada setiap akses masuk Pantai Kuta. Pemasangan beberapa tempat cuci tangan sepanjang Pantai Kuta yang dilengkapi dengan papan peringatan maupun langkah-langkah mencuci tangan menjadi langkah pencegahan dan memenuhi prosedur protokol kesehatan sehingga Pantai Kuta diperbolehkan untuk beroperasi selama uji coba pembukaan tempat wisata.

Kondisi pandemi mengakibatkan pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat, pemberlakuan aplikasi PeduliLindungi menjadi bagian instrumen yang digunakan dalam membatasi aktivitas masyarakat serta mampu melakukan kontrol terhadap penyebaran Covid-19. Pada dasarnya upaya ini dilakukan dalam kerangka kesehatan yang bergerak melalui ideologi dan narasi oleh pemerintah. Kebijakan kesehatan sebagai kebijakan publik bersifat memaksa masyarakat untuk patuh dan mengikuti kebijakan apabila ingin masuk dalam fasilitas umum yang mewajibkan pelaksanaan kebijakan PeduliLindungi.

Pemasangan *barcode* yang dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Pantai Kuta sebagai sebuah tindak lanjut kebijakan yang

diperintahkan oleh Pemerintah Daerah dengan pemasangan *barcode scan* aplikasi PeduliLindungi setiap masuk dalam daerah wisata tersebut, hal ini juga mampu mengetahui jumlah kapasitas kunjungan yang diperbolehkan sesuai dengan aturan sehingga tetap mampu mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan.

Konsep Althusser mengenai *ideological state apparatus* bagaimana negara dalam hal ini melalui aparatnya berusaha mendominasi masyarakat melalui narasi baik itu melalui poster maupun penyampaian langsung yang tercermin melalui upaya himbauan yang dilakukan oleh aparat setempat melalui pengeras suara. Hanya saja upaya yang dilakukan melalui *repressive state apparatus* dengan aparat yang langsung terjun berkeliling mengawasi masyarakat untuk patuh bahkan memberikan hukuman dan penertiban terhadap pelanggar kebijakan penerapan protokol kesehatan pada wilayah destinasi wisata Pantai Kuta.

Koordinasi aparat terkait dalam pelaksanaan kebijakan PeduliLindungi membuktikan bahwa upaya represif digunakan dalam memastikan keteraturan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan PeduliLindungi menjadi tujuan utama kolaborasi beberapa komponen aparat dalam pelaksanaannya. Penjagaan yang dilakukan pada 28 pintu masuk Pantai Kuta memerlukan banyak aparat petugas yang berjaga, hal ini karena jumlah pengunjung yang datang harus tetap teratur dan tanpa terlewat satupun dalam upaya *scan barcode* aplikasi PeduliLindungi.

Secara umum pihak Satgas Covid-19 Pantai Kuta bertanggung jawab utama terhadap keberlangsungan kebijakan, pihak Satgas dibantu koordinasi dengan aparat desa yaitu ada elemen Jagabaya dan Pecalang yang memiliki peran membantu penjagaan karena wilayah Pantai Kuta yang luas ditambah akses masuk yang ada 28 pintu, kemudian Pihak BABINSA dan Kepolisian bersifat membantu dikarenakan di depan pintu masuk Pantai Kuta tersedia Pos Polisi yang menjaga ketertiban masyarakat dan pengunjung yang ada di seputaran Pantai Kuta, pihak komponen aparat yang bersinergi menjadi pola penguatan penjagaan yang dilakukan aparat dalam penerapan PeduliLindungi di Pantai Kuta yang menjadi syarat wajib untuk masuk.

Pelaksanaan PeduliLindungi sebagai syarat wajib memasuki fasilitas umum menjadi hal yang menarik, fitur yang tersedia dalam PeduliLindungi menjadikan data surat vaksin sebagai ketentuan wajib yang harus diisi. Upaya vaksin menjadi kepatuhan yang wajib diikuti oleh masyarakat dalam rangka upaya penanganan Virus Covid-19. Surat Vaksin didapatkan setelah masyarakat melakukan vaksin covid-19 yang terdiri dari tahap satu, dua, maupun tahap tiga. Upaya kepatuhan ini menjadi tindak lanjut dari penanganan sehingga mau tidak mau masyarakat wajib untuk di vaksin sehingga mampu memenuhi data yang terdapat di PeduliLindungi sehingga mampu mengakses fasilitas umum.

Kepentingan yang dimiliki oleh Pedagang maupun pengunjung menjadikan kebijakan dalam upaya penanganan



Pandemi Covid-19 ini dilakukan, mereka juga ingin tetap berdagang maupun berkunjung sehingga regulasi yang diterapkan serta penjagaan aparat dalam pengawasan menjadikan kebijakan dengan orientasi kesehatan sebagai upaya penanganan Covid-19 tetap dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan untuk tetap menghasilkan pendapatan biaya kehidupan sehari-hari untuk keluarga.

Kebijakan yang bersifat memaksa mengakibatkan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan pada destinasi wisata Pantai Kuta untuk mengikuti kebijakan yang diterapkan. Sebagai bagian syarat wajib maka pihak yang berkepentingan wajib memiliki telepon pintar agar mampu mengakses tempat wisata tersebut. Kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak yang berkepentingan terutama pedagang yang tidak memiliki telepon pintar diberikan solusi dengan syarat menunjukkan bukti vaksin kedua Covid-19 kepada petugas yang melakukan penjagaan.

### **Kebijakan PeduliLindungi sebagai bekerjanya Ideologi dan Aparatus Narasi Ekonomi Pasar**

Althusser menyatakan bahwa salah satu yang menyebabkan manusia bergerak adalah ideologi yang bergerak dalam dirinya (Pertiwi, 2018). Pada penerapan kebijakan PeduliLindungi ini juga berlangsung ketika peneliti mencari informan yang terkena imbas langsung dari Pandemi, berbeda dengan ideologi kesehatan ternyata pihak yang berdiri pada ideologi ekonomi kontras

dengan kepentingan-kepentingan yang diterjemahkan oleh ideologi Kesehatan. Hal ini terjadi karena bagaimanapun ideologi ekonomi menjadi sesuatu yang sangat tidak bekerja ketika kawasan tersebut terjadi pembatasan-pembatasan pengunjung sehingga mereka merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Pedagang menyiratkan bahwa kepentingan ekonomi sangat bertolak belakang dengan kebijakan PeduliLindungi karena hal tersebut mengakibatkan pengunjung mengalami kesulitan dalam mengakses masuk menuju destinasi wisata Pantai Kuta. Berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi berupa pengisian biodata dan memenuhi syarat vaksin yang sudah harus dipenuhi sehingga kunjungan wisatawan semakin menurun karena regulasi yang menghambat berdasarkan sudut pandang ekonomi.

Kebijakan yang diterapkan di Pantai Kuta selama Pandemi sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha, pedagang, maupun pekerja yang bergantung pada sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan. Pedagang yang mengeluhkan berbagai kebijakan selama masa uji coba pembukaan wisata ini masih tetap belum mampu mendatangkan pengunjung karena syarat berkunjung dan ketakutan masyarakat. Upaya pembukaan sektor Pariwisata tidak dibarengi dengan kedatangan penerbangan luar negeri yang belum diperbolehkan sepenuhnya serta syarat kunjungan yang mempersulit wisatawan dalam berkunjung salah satunya pada awal percobaan pembukaan tempat wisata, para wisatawan

diwajibkan untuk memenuhi syarat dengan berbagai tes dan karantina di Hotel yang telah disediakan pemerintah dengan biaya pribadi selama 14 Hari.

Kondisi yang ada dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi saat ini ada begitu banyak penawaran, namun permintaan yang tidak sebanding mengakibatkan persaingan dalam penawaran terjadi di antara pedagang. Persaingan ini terjadi sebagai dampak 2 tahun terakhir pedagang belum mendapat kepastian terhadap pandemi yang mempengaruhi pendapatan mereka, perselisihan yang terjadi di antara pedagang dalam memperebutkan agar pengunjung mau berbelanja di tempat mereka. Narasi ekonomi terkait dengan persaingan antara pedagang akibat penghasilan yang menurun drastis di tengah kebijakan pemerintah yang berusaha melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

### **Narasi Kesehatan Versus Narasi Ekonomi**

Secara umum penelitian ini menemukan fakta lapangan bahwa pemberlakuan aplikasi PeduliLindungi mau tidak mau menyertakan dua narasi besar yang saling berkontestasi. Narasi besar tersebut seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya yaitu adanya narasi ideologi dan *state apparatus* yang berbeda dari masing-masing narasi yang dibangun. Dua narasi tersebut ketika masa pandemi bekerja dan menemukan bentuk-bentuk barunya bahkan dalam konteks yang ditekankan oleh Althusser bahwa negara mengejawantahkan sebagai instrumen

mesin represif yang membangun ketundukan terhadap kebijakan yang diterapkan untuk mengatur masyarakatnya, baik secara hegemoni maupun dominasi.

Dinamika dominasi dan upaya resistensi yang dilakukan oleh pihak yang terdominasi terlihat melalui narasi yang muncul dari kedua belah pihak. Pihak aparat Negara berpegang teguh pada narasi Kesehatan dalam upaya pelaksanaan kebijakan PeduliLindungi. Hal yang menjadi pemikiran bahwa kebijakan tersebut harus berjalan, upaya pencegahan ajakan maupun himbauan terus dilakukan secara rutin dengan melibatkan aparat terkait yang saling berkolaborasi untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai harapan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Kombinasi yang terjadi dalam penerapan kebijakan PeduliLindungi diantara *ideological dan repressive state apparatus* memiliki satu tujuan utama yaitu upaya kontrol terhadap masyarakat dengan harapan mampu memberikan pengendalian dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Negara melalui aparat bersinergi menunjukkan sisi represif yang dimiliki sehingga masyarakat patuh dan taat terhadap segala kebijakan yang dilaksanakan.

Hal ini terkait dengan kebijakan PeduliLindungi sebagai kebijakan publik yang pada dasarnya merupakan respon pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat khususnya di masa pandemi. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi melalui fitur pemindaian dan penyaringan terhadap

masyarakat dalam memasuki fasilitas umum.

Pihak pedagang yang berpegang pada tatanan ekonomi memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami kondisi pandemi Covid-19. Permasalahan yang mereka hadapi dan kepentingan yang ada dalam diri mereka mengakibatkan sudut pandang utama yang diharapkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan diharapkan jangan berbelit-belit bahkan mempersulit pengunjung yang hendak berkunjung karena sebagai pedagang yang ada di seputaran Pantai Kuta.

Kebijakan PeduliLindungi dan berbagai kebijakan lainnya selama kondisi Pandemi Covid-19 tentunya menurunkan tingkat kunjungan wisatawan yang otomatis berdampak sangat erat dengan penurunan pendapatan penjualan pedagang di Pantai Kuta. Pihak pedagang yang menjadikan Pantai Kuta sebagai tempat mencari penghasilan menjadi terdominasi oleh kebijakan yang diterapkan selama aplikasi PeduliLindungi diterapkan.

Narasi yang muncul dari pedagang bahwa mereka sebagai “rakyat kecil” menyurutkan upaya perlawanan yang lebih besar terhadap kebijakan yang dilakukan, kepentingan mereka memaksa untuk tetap patuh terhadap kebijakan yang dijalankan, posisi mereka yang hanya bisa berharap bahwa ada kebijakan yang menguntungkan dan mendatangkan kunjungan wisatawan yang selalu diharapkan dalam upaya mengembalikan perekonomian yang hancur karena kondisi pandemi khususnya di sektor pariwisata.

Sebagai aplikasi yang digunakan pemerintah dalam melakukan kontrol serta pengawasan maka aplikasi PeduliLindungi memiliki peran yang sangat penting karena setiap warga wajib untuk mengunduh aplikasi tersebut dalam beraktivitas. Pihak aparat yang bertugas melakukan penjagaan terdiri dari Satgas Covid-19 Pantai Kuta, Polsek Kuta, Babinsa, Jagabaya Desa Kuta, Pecalang Desa Adat Kuta, dan pihak Balawista Pantai Kuta di bawah Dinas Pariwisata bersinergi menjaga dan memastikan kebijakan PeduliLindungi dan Protokol kesehatan dipenuhi oleh Pengunjung maupun pedagang yang ada di wilayah Pantai Kuta.

Bentuk *state apparatus* ini mengejawantah dalam bentuk upaya responitas berupa poster, pamphlet, *barcode* di pintu masuk. Kehadiran petugas yang secara berkala hadir melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan terhadap pengunjung maupun pedagang yang ada di Pantai Kuta. Responitas yang terjadi dari ideologi dengan narasi ekonomi atas dominasi pengetahuan yang terus dilakukan diaktualisasi dengan tindakan pembongkaran pintu masuk yang sempat dibatasi dan pelanggaran terhadap kebijakan yang dianggap merugikan oleh pedagang.

Bentuk-bentuk resistensi yang terjadi dengan adanya upaya pembukaan kawat berduri yang menjadi batas akses masuk Pantai Kuta agar mereka tetap bisa berjualan. Pembongkaran beton-beton pintu masuk yang menghambat pedagang, hal yang tidak pernah diakomodasi oleh

Althusser itu adalah upaya-upaya resistensi dari pihak-pihak yang terdominasi.

Temuan inilah yang sekiranya menjadi berharga dalam penelitian skripsi ketika Althusser menekankan terkait dengan fenomena ini ternyata pada penelitian di lapangan menemukan bahwa meskipun Althusser tidak menampilkan bentuk-bentuk perlawanan ternyata di satu sisi narasi ekonomi yang terdominasi oleh narasi kesehatan melakukan bentuk-bentuk resistensinya.

## 5. KESIMPULAN

Pemahaman mengenai upaya dominasi aparatus kekuasaan dengan perspektif Louis Althusser diawali dengan upaya melihat dominasi yang dilakukan oleh Negara melalui konsep *State Apparatus* yang didalamnya dibagi menjadi dua yaitu *Repressive state apparatus* dan *Ideological State Apparatus*. Upaya yang dilakukan dalam melihat fenomena dominasi aparatus kekuasaan dalam penerapan kebijakan PeduliLindungi di Pantai Kuta dengan melihat bagaimana narasi yang dimunculkan dari dua ideologi besar yang saling bertentangan dengan adanya pihak yang mendominasi dan pihak yang terdominasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, terdapat dua ideologi besar yang saling mempengaruhi yaitu Ideologi Kesehatan dari sudut pandang aparat negara dalam penerapan kebijakan PeduliLindungi dan Ideologi Ekonomi dari sudut pandang pedagang di seputaran Pantai Kuta yang mengalami dampak langsung dari Kebijakan PeduliLindungi.

Narasi yang muncul di antara pihak yang mendominasi dan terdominasi memunculkan bahwa narasi ekonomi dari pedagang menjadi pihak yang terdominasi oleh narasi kesehatan yang dihasilkan oleh pemerintah melalui kebijakan pengawasan dan penerapan Aplikasi PeduliLindungi di Pantai Kuta, hal yang menarik bahwa pihak yang terdominasi memunculkan resistensinya dengan upaya yang dilakukan salah satunya adalah melakukan pembongkaran tembok yang dibangun pada pintu masuk Pantai Kuta yang pada awal mulanya diharapkan mempermudah penjangaan namun pihak pedagang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa "Dominasi aparatus kekuasaan dan respon terhadapnya dalam penerapan kebijakan PeduliLindungi di Pantai Kuta mampu melihat ada pihak pedagang dengan ideologi ekonomi terdominasi oleh Aparat sebagai instrumen Pemerintah yang mendominasi."

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Cole, K. C. (1984). The Theory of the State as a Sovereign Juristic Person. *American Political Science Review*, 42(1), 16-31.
- Fischer, F. (2020). Citizens, Experts, and the Environment. *Citizens, Experts, and the Environment*.
- Frindo, M. M. (2020). Peran Masyarakat Dalam Menghadapi New Normal, Sosialisasi Aplikasi (Peduli Lindungi). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unniversitas Bandung*, 2, 31-40.
- Hyslop-Margison, E. J., & Leonard, H. A. (2012). Post Neo-Liberalism and the Humanities: What the Repressive State Apparatus Means for Universities. *Canadian Journal of Higher Education*, 42(2), 1-12.

- Karnaedi, Y. (2021). Peduli Lindungi Diterapkan Di Pantai Kuta, Kendala Ini Mendominasi. *Balipost.Com*.
- Mallard, G. (2005). Rationalizing Capitalist Democracy : The Cold War Origins of Rational Choice Liberalism. *Critique internationale*, 26(1), 161.
- Olivia, D., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Aplikasi Surveilans Kesehatan Peduli Lindungan Dan Covidsafe Di Indonesia Dan Australi. 3(2017), 54-67. Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Pertiwi, A. D. (2018). Repressive State Apparatus , Ideological State Apparatuses , and Social Criticism in Neal Shusterman. *S Unwind*.
- Putri, C. E., & Hamzah, R. E. (2021). Aplikasi Pedulilindungi Mitigasi Bencana Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 66-77.
- Rosyadi. (2014). Sistem Pengetahuan Lokal Masyarakat Cindaun - Cianjur Selatan Sebagai Wujud Adaptasi Budaya. *Patanjala*, 6(3), 431-446.
- Suryawan, O. (2021). Permudah Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi, 17 Pintu Masuk Ke Pantai Kuta Ditutup. *Balipuspanews.Com*.